

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Bogor merupakan bukan merupakan daerah yang masuk kedalam penghitungan IHK di Jawa Barat, namun terkait perkembangan harga kebutuhan pokok dan penting setiap minggu dapat dilihat melalui rilis yang dikeluarkan oleh BPS yaitu IPH series. (Indeks Perkembangan Harga).

Nilai IPH Oktober Tahun 2025 yaitu $M1 = 0,33$ dengan andil daging ayam ras(0.3093), cabai merah(0.2), telur ayam ras(0.1496). $M2 = 0,61$ dengan andil Komoditas yang mempengaruhi IPH adalah daging ayam ras(0,3093), cabai merah(0,2882), telur ayam ras(0,2089). $M3 = 0,87$ dengan andil IPH adalah Cabai Merah(0,3728), Telur Ayam Ras(0,2772), Daging Ayam Ras(0,2663). $M4 = 0,88$ dengan andil Komoditas yang mempengaruhi IPH adalah cabai merah(0.3821), telur ayam ras(0.3117), daging ayam ras (0.2311). Berdasarkan data IPH Kabupaten Bogor bulan Oktober, perkembangan IPH menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari $M1$ hingga $M4$, yang mencerminkan menguatnya tekanan harga sepanjang bulan dan terutama bersumber dari kelompok barang kebutuhan pokok dan barang penting, khususnya komoditas pangan strategis seperti cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras yang secara berulang menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Dominasi cabai merah pada paruh kedua bulan menegaskan tingginya volatilitas harga komoditas hortikultura akibat faktor cuaca, musim, dan distribusi, sementara kontribusi telur dan daging ayam ras mengindikasikan tekanan pada sisi produksi dan biaya yang berdampak langsung pada harga konsumen. Sementara itu, kelompok barang lainnya dan jasa relatif stabil dan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap IPH, sehingga tekanan inflasi masih terkonsentrasi pada komoditas pangan. Ke depan, risiko kenaikan harga masih perlu diwaspadai, terutama jika terjadi gangguan pasokan lanjutan atau lonjakan permintaan musiman, sehingga diperlukan langkah antisipatif melalui pengamanan pasokan, kelancaran distribusi, dan intervensi stabilisasi harga yang terukur serta penguatan koordinasi TPID agar tekanan harga tidak berlanjut menjadi inflasi yang lebih luas.

- Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Bogor pada bulan Oktober 2025 dari 11 komoditas yang dipantau harganya setiap minggu di tingkat pedagang, beberapa komoditas di tingkat konsumen dengan harga di atas HAP/HET/ Harga rata-rata 6 bulan terakhir mengalami penurunan harga kecuali komoditas Beras Premium (Naik 0,12%), Beras Medium (Naik 0,06%), Bawang Merah (Naik 0,08%), Jagung Pipilan (Naik 0,33%), Kedelai (Naik 0,32%) dan Telur Ayam Ras (Naik 0,13%) sedangkan Tepung Terigu tidak mengalami perubahan harga.
- Nilai IPH pada bulan November Tahun 2025 yaitu $M1 = -0,03$ dengan andil komoditas Beras(-0,1562), Daging Ayam Ras (-0,1557), Cabai Rawit(-0,1361) $M2 = -0,22$ dengan andil Komoditas yang mempengaruhi IPH adalah Daging Ayam Ras(-0,293), Beras (-0,1562), Cabai Rawit(-0,1361). $M3 = -0,14$ dengan andil Komoditas yang mempengaruhi IPH adalah daging ayam ras(-0.3383), beras(-0.1562), telur ayam ras(-0.0854). $M4 = 0,03$ dengan andil Komoditas yang mempengaruhi IPH adalah cabai merah (0,2534), jeruk(0,2157), cabai rawit(0,0625). Berdasarkan data IPH Kabupaten Bogor bulan November 2025, perkembangan IPH menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan deflasi pada tiga minggu pertama sebelum kembali stabil pada akhir

bulan. Pada Minggu I hingga Minggu III (M1-M3), IPH berada pada zona negatif, yang menandakan terjadinya penurunan harga, terutama pada kelompok barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan komoditas utama penyumbang deflasi adalah beras, daging ayam ras, cabai rawit, dan telur ayam ras. Penurunan harga komoditas tersebut mengindikasikan membaiknya pasokan, lancarnya distribusi, serta kemungkinan melemahnya permintaan masyarakat pasca periode tekanan harga sebelumnya. Sementara itu, kelompok barang lainnya dan jasa relatif stabil dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pergerakan IPH sepanjang November. Memasuki Minggu IV (M4), IPH kembali positif meskipun sangat terbatas, didorong oleh kenaikan harga cabai merah, jeruk, dan cabai rawit, yang mencerminkan mulai munculnya kembali volatilitas harga komoditas hortikultura. Ke depan, risiko tekanan harga tetap perlu diantisipasi, khususnya pada komoditas sayuran dan buah yang sensitif terhadap cuaca dan distribusi, sehingga diperlukan penguatan pemantauan harga, pengamanan pasokan, serta koordinasi TPID secara berkelanjutan agar kondisi harga tetap terkendali dan deflasi tidak berbalik menjadi tekanan inflasi yang tajam.

- Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Bogor pada bulan November 2025 dari 11 komoditas yang dipantau harganya setiap minggu di tingkat pedagang, Beras Premium (Turun 0,19%), Beras Medium (Turun 0,30%), Gula Pasir (Turun 0,15%), Bawang Merah (Turun 0,83%), Cabai Merah Besar (Turun 1,52%), Cabai Merah Keriting (Turun 1,55%), Kedelai (Turun 0,33%) dan Telur Ayam Ras (Turun 0,08%)
- IPH pada bulan Desember Tahun 2025 M1= 1.24 dengan andil Komoditas yang mempengaruhi IPH adalah Cabai Rawit(0,9652), Daging Ayam Ras(0,1372), Bawang Merah(0,1161). M2 = 1.95 dengan andil Komoditas yang mempengaruhi IPH adalah Cabai Rawit(1,4326), Daging Ayam Ras(0,2454), Bawang Merah(0,2046). M3=2.14 dengan andil Komoditas yang mempengaruhi IPH adalah cabai rawit(1.5617), daging ayam ras(0.3356), bawang merah(0.2048). M4=2.04 dengan andil Komoditas yang mempengaruhi IPH adalah cabai rawit(1,4754), daging ayam ras(0,3778), bawang merah(0,1856). Berdasarkan data IPH Kabupaten Bogor bulan Desember 2025, perkembangan IPH menunjukkan tren kenaikan yang sangat kuat dan konsisten sepanjang bulan, dengan nilai IPH yang relatif tinggi sejak Minggu I dan mencapai puncaknya pada Minggu III sebelum sedikit melandai pada Minggu IV. Tekanan harga tersebut sangat dominan berasal dari kelompok barang kebutuhan pokok dan barang penting, khususnya komoditas pangan strategis seperti cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah, di mana cabai rawit menjadi kontributor utama dengan andil yang sangat besar pada seluruh minggu, mencerminkan volatilitas harga yang ekstrem akibat faktor cuaca, gangguan produksi, serta keterbatasan pasokan dan distribusi. Kenaikan harga daging ayam ras dan bawang merah turut memperkuat tekanan inflasi, yang mengindikasikan adanya peningkatan permintaan musiman akhir tahun serta tekanan biaya di sisi hulu. Sementara itu, kelompok barang lainnya dan jasa relatif stabil dan belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap kenaikan IPH, sehingga tekanan inflasi masih terkonsentrasi pada sektor pangan. Ke depan, risiko inflasi tetap tinggi apabila tidak diimbangi dengan langkah pengendalian yang efektif, terutama terkait pengamanan pasokan cabai rawit dan bawang merah serta stabilisasi harga protein hewani, sehingga diperlukan intervensi yang lebih agresif dan terkoordinasi oleh TPID, melalui penguatan pasokan lintas daerah, kelancaran distribusi, dan operasi stabilisasi harga, agar lonjakan harga tidak berlanjut dan berdampak lebih luas terhadap daya beli masyarakat.
- Perkembangan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Bogor pada Triwulan IV 2025 relatif fluktuatif namun terkendali. Pada Oktober masih terdapat kenaikan harga pada

beberapa komoditas strategis seperti beras, bawang merah, jagung pipilan, kedelai, dan telur ayam ras, meskipun sebagian besar komoditas lainnya mengalami penurunan. Kondisi membaik pada November, ditandai dengan penurunan harga yang cukup merata pada mayoritas komoditas pangan, mencerminkan membaiknya pasokan dan distribusi. Namun pada Desember, tekanan harga kembali muncul pada komoditas tertentu, terutama jagung pipilan, kedelai, dan Minyak Kita, seiring meningkatnya permintaan musiman akhir tahun, sehingga tetap diperlukan kewaspadaan dan pemantauan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga.

- Perkembangan inflasi di tingkat daerah pada Triwulan IV (Oktober-Desember) 2025 perkembangan IPH menunjukkan pola fluktuatif namun dengan kecenderungan meningkat tajam pada akhir triwulan. Pada Oktober, IPH bergerak naik secara bertahap dari minggu ke minggu, mencerminkan mulai menguatnya tekanan harga yang didorong oleh cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras, sehingga menandakan munculnya tekanan inflasi berbasis pangan. Memasuki November, IPH justru mengalami koreksi ke zona negatif pada tiga minggu pertama, yang mengindikasikan terjadinya deflasi akibat penurunan harga beras, daging ayam ras, cabai rawit, dan telur ayam ras, seiring membaiknya pasokan dan distribusi serta melemahnya permintaan, sebelum kembali stabil pada akhir bulan. Namun, pada Desember, IPH melonjak signifikan dan konsisten pada level tinggi, dengan tekanan harga yang sangat kuat dan didominasi oleh cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah, mencerminkan kombinasi faktor musiman akhir tahun, gangguan produksi akibat cuaca, serta peningkatan permintaan masyarakat. Sepanjang Triwulan IV, tekanan IPH terutama berasal dari kelompok barang kebutuhan pokok dan barang penting, sementara kelompok barang lainnya dan jasa relatif stabil dan belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pergerakan indeks. Ke depan, risiko tekanan inflasi masih tinggi, khususnya pada komoditas pangan yang bersifat volatil seperti cabai dan bawang, sehingga diperlukan penguatan langkah pengendalian inflasi daerah melalui pengamanan pasokan lintas wilayah, kelancaran distribusi, intervensi stabilisasi harga yang terukur, serta koordinasi TPID yang lebih responsif agar lonjakan harga pangan tidak meluas dan berdampak pada inflasi yang lebih luas serta daya beli masyarakat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Volatilitas harga komoditas pangan strategis (volatile food) merupakan faktor paling dominan dalam mendorong dinamika inflasi daerah, khususnya di Kabupaten Bogor, sebagaimana tercermin dari kontribusi berulang komoditas cabai (merah dan rawit), bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras terhadap pergerakan IPH. Karakteristik komoditas tersebut yang sangat sensitif terhadap perubahan cuaca, musim panen, serta gangguan produksi dan distribusi menyebabkan fluktuasi pasokan yang cepat dan sulit diprediksi, sehingga harga di tingkat konsumen mudah bergejolak. Selain itu, siklus produksi yang relatif pendek, terutama pada hortikultura dan peternakan unggas, membuat penyesuaian antara pasokan dan permintaan tidak selalu berjalan seimbang, terutama saat terjadi lonjakan permintaan musiman. Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan pasokan dari luar daerah dan keterbatasan buffer stok, sehingga setiap gangguan kecil di sisi hulu dapat langsung berdampak pada kenaikan harga di tingkat konsumen dan dengan cepat mendorong tekanan inflasi daerah.
2. Ketergantungan pasokan dari luar daerah dan kerentanan distribusi menjadi permasalahan struktural dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor, mengingat sebagian besar kebutuhan pangan strategis masih dipenuhi melalui pasokan lintas wilayah. Kondisi ini menyebabkan stabilitas harga sangat rentan terhadap gangguan

distribusi, seperti hambatan transportasi, kemacetan jalur logistik, cuaca ekstrem, serta kenaikan biaya angkut dan bahan bakar. Ketika terjadi keterlambatan pasokan atau penurunan volume distribusi, ketersediaan barang di pasar cepat menurun dan memicu kenaikan harga di tingkat konsumen. Kerentanan tersebut semakin terasa pada periode tekanan musiman, seperti hari besar keagamaan dan akhir tahun, saat permintaan meningkat sementara kapasitas distribusi belum sepenuhnya siap mengimbangi lonjakan kebutuhan. Tanpa penguatan sistem logistik dan pengamanan pasokan alternatif, ketergantungan ini berpotensi memperbesar volatilitas harga dan mempercepat transmisi tekanan inflasi dari wilayah produsen ke Kabupaten Bogor.

3. Tekanan permintaan musiman yang tidak sepenuhnya diimbangi pasokan menjadi faktor penting dalam meningkatnya tekanan inflasi daerah, khususnya pada periode tertentu seperti hari besar keagamaan dan akhir tahun. Pada momen tersebut, konsumsi masyarakat terhadap komoditas pangan strategis—terutama cabai, bawang, serta protein hewani seperti telur dan daging ayam ras—meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Namun, kesiapan pasokan dan distribusi sering kali belum mampu menyesuaikan secara cepat terhadap lonjakan permintaan tersebut, baik karena keterbatasan produksi, siklus panen, maupun kendala distribusi. Ketidakseimbangan ini tercermin dari meningkatnya IPH, terutama pada bulan Desember, yang menunjukkan bahwa tekanan permintaan musiman memiliki dampak langsung terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen. Tanpa langkah antisipatif berupa pengamanan pasokan lebih awal, manajemen stok, dan distribusi yang lebih adaptif, tekanan permintaan musiman berpotensi berulang dan menjadi pemicu inflasi daerah yang bersifat periodik.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Keterjangkauan Harga:

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor secara berkala memantau harga barang kebutuhan pokok untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Pemantauan ini membantu mendeteksi fluktuasi harga sejak dini, sehingga langkah intervensi dapat dilakukan dengan cepat, seperti operasi pasar atau pembentukan cadangan pangan. Selain itu, informasi pasar yang akurat disampaikan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mencegah spekulasi. Dengan koordinasi yang lebih baik, pemantauan ini mendukung kebijakan yang efektif dan responsif dalam menjaga kestabilan harga di pasar. Pemantauan dan pasokan setiap hari melalui aplikasi SIDIRGA yang terintegrasi dengan SiLINDA Jawa Barat.
- Melaksanakan Gelar Pangan Murah dengan komoditas beras SPHP, beras medium, beras premium, telur ayam, daging ayam ras, minyak goreng, gula pasir, cabe merah keriting, cabe rawit, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, daging sapi, cabe merah besar dan sayuran. Sampai bulan Desember 2025, GPM yang sudah terlaksana adalah 546 kali, dimana 529 kali sumber dana APBD kab Bogor dan 5 kali berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat dan 11 kali Mandiri. Pelaksanaan GPM tersebar di 40 Kecamatan dengan total omzet sebesar Rp 34.602.321.250 dan total tonase 2.260.768 Kg/L
- Melakukan Sidak di Pasar Rakyat, Distributor, produsen dan Toko Modern/ Retail pada komoditas beras, minyak, bawang merah, cabai, telur sebanyak 10 kali;
- Membangun dan memberdayakan kios pangan dan saung inflasi yang telah terbangun sebanyak 21 unit pada 10 Kecamatan dan menyalurkan 10 Kwintal SPHP di Saung Inflasi Pasar Rakyat Cibinong yang bekerjasama dengan BULOG, Perumda Pasar Tohaga dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

Melaksanakan Operasi Pasar, OPADI, Kecamatan Ekspo untuk Beras SPHP, Minyakita dan komoditas lainnya;

- Memberikan subsidi transportasi melalui Fasilitas Distribusi Pangan sebanyak 529 kali dengan realisasi biaya sebesar Rp 7.668.625. 000 dan omzet 34.602.321.250

Ketersediaan Pasokan:

- Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), dengan stok beras CPPD awal sebanyak 462.077,37 kg, yang sudah disalurkan 43.234,99 kg, sehingga stok CPPD yang tersisa sebanyak 418.842,38 kg.
- Penambahan Luas Tambah Tanam (LTT) padi berhubungan langsung dengan ketersediaan pasokan beras, yang merupakan komoditas pangan utama di Kabupaten Bogor. Peningkatan LTT padi akan menambah jumlah produksi beras, sehingga pasokan beras di pasar lebih stabil dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada impor beras dan mencegah lonjakan harga beras yang dapat memicu inflasi pangan. Dengan pasokan beras yang lebih mencukupi, stabilitas harga pangan di Kabupaten Bogor dapat terjaga, mendukung pengendalian inflasi di daerah tersebut. Pada triwulan IV, penambahan LTT Padi di Kabupaten adalah seluas 28.320,9 Ha, pada bulan Oktober seluas 9.657,67 Ha, bulan November seluas 10.734,69 Ha dan Desember seluas 7.928,64 Ha yang tersebar di 40 Kecamatan.
- Penambahan luas panen padi berkontribusi langsung terhadap pengendalian inflasi melalui peningkatan ketersediaan pangan pokok, khususnya beras, yang merupakan komoditas dengan andil besar terhadap inflasi daerah. Dengan bertambahnya luas tanam dan panen, produksi padi meningkat sehingga pasokan beras di pasar menjadi lebih stabil dan mampu menahan tekanan harga saat permintaan naik. Ketersediaan pasokan yang memadai juga membantu menekan biaya distribusi karena ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah berkurang. Selain itu, peningkatan produksi lokal memungkinkan pemerintah daerah memiliki cadangan beras yang cukup untuk melakukan intervensi pasar, seperti operasi pasar dan kegiatan pangan murah, saat harga bergejolak. Secara keseluruhan, penambahan luas panen padi tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjadi strategi penting dalam menjaga kestabilan harga dan mengendalikan inflasi secara berkelanjutan di tingkat daerah. Pada triwulan IV, penambahan luas panen padi di Kabupaten adalah seluas 11.901,98 ha dimana, bulan Oktober adalah seluas 3.764,99 ha, bulan november adalah seluas 3.798,86 ha, bulan desember adalah seluas 4.338,14 ha yang tersebar di 40 Kecamatan.
- Pembangunan lumbung 6 unit, leuit 7 unit, *Rice Milling Unit* 4 unit, lantai jemur 4 titik dan bed dryer 1 unit.
- Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi pertanian dan perpipaan untuk lahan pertanian.

Kelancaran Distribusi:

1. Distribusi minyak goreng, minyakita di kegiatan Gelar Pangan Murah.
 2. Distribusi beras petani lokal oleh BUMD Perumda Pasar Tohaga kepada ASN dalam program beras Carita Makmur.
 3. Pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor
 4. Pembangunan infrastruktur program Satu Milyar Satu Desa (Samisade) dan program lainnya.
 5. Memperlancar jalur lalu lintas di Kabupaten Bogor dan daerah perbatasan serta
-

melakukan rekayasa jalur lalin pada saat kondisi tertentu.

Komunikasi Efektif:

1. Melaksanakan rakord TPID bersama Kementerian Dalam Negeri sebanyak 67 kali;
 2. Melaksanakan Rakord TPID bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 15 kali.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Efektivitas Kebijakan Pengendalian Harga

Intervensi langsung seperti Gelar Pangan Murah, Operasi Pasar Bersubsidi, dan pengaturan distribusi antarwilayah telah terbukti mampu meredam lonjakan harga dalam jangka pendek dengan cepat menambah pasokan di pasar-pasar yang terdampak. Program-program ini efektif menurunkan harga eceran dan meredakan tekanan psikologis konsumen, terutama pada puncak permintaan (mis. hari besar keagamaan). Namun efektivitasnya terbatas oleh skala dan frekuensi pelaksanaan: bila kegiatan hanya insidental atau anggarannya terbatas, dampaknya cepat habis setelah operasi selesai. Selain itu, tanpa sinkronisasi dengan kebijakan hulu (mis. peningkatan produksi, penyimpanan, dan distribusi) operasi pasar cenderung mengatasi gejala, bukan penyebab fluktuasi harga.

Fokus Kebijakan yang Masih Reaktif

Banyak kebijakan daerah cenderung muncul sebagai respons terhadap lonjakan harga yang telah terjadi—misalnya pengadaan pasar murah setelah harga naik—daripada pencegahan melalui kebijakan hulu. Pendekatan reaktif ini memerlukan sumber daya besar tiap kali gejala muncul dan tidak membangun ketahanan jangka panjang. Untuk bertransformasi menjadi preventif diperlukan perencanaan musiman (tanam/paceklik), kebijakan insentif bagi petani agar menanam komoditas strategis pada periode yang tepat, pengelolaan cadangan komoditas, serta perjanjian pasokan antarwilayah untuk mengantisipasi kekurangan. Kebijakan preventif juga berarti mengadopsi skenario risiko (iklim, logistik, permintaan musiman) dalam perencanaan anggaran dan program.

Rekomendasi Penguatan Kebijakan ke Depan

Strategi ke depan harus bersifat terintegrasi dan berkelanjutan: meningkatkan produksi lokal (ekstensifikasi luas tanam dan intensifikasi produktivitas melalui teknologi pertanian), memperkuat infrastruktur logistik dan penyimpanan (cold storage, gudang buffer, pusat distribusi), serta memangkas rantai distribusi lewat dukungan pasar lelang, direct buying, atau platform digital yang menghubungkan petani langsung ke pembeli. Digitalisasi sistem informasi pasar dan rantai pasok memungkinkan respon lebih cepat dan alokasi intervensi yang efisien. Selain itu, penguatan kapasitas institusi TPID—dengan SOP bersama, skenario krisis, dan mekanisme pendanaan darurat—serta keterlibatan sektor swasta dan komunitas petani akan memperbesar daya tahan daerah terhadap guncangan harga. Kombinasi kebijakan jangka pendek (operasi pasar terarah) dan jangka panjang (ketahanan produksi dan logistik) diperlukan untuk menurunkan volatilitas harga dan menjaga stabilitas inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Penguatan Produksi dan Distribusi Pangan Lokal

Pemerintah daerah perlu memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan memperluas lahan tanam, terutama untuk komoditas penyumbang inflasi seperti beras, cabai, dan bawang merah. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan sarana produksi pertanian (pupuk, benih unggul, alat pertanian modern), pendampingan teknis, serta optimalisasi lahan tidur. Selain itu, perlu dibangun sistem distribusi yang efisien dengan memperpendek rantai pasok melalui kerja sama antara petani, koperasi, BUMD pangan, dan pasar rakyat untuk menekan biaya distribusi dan menjaga kestabilan harga.

Penguatan infrastruktur logistik dan sarana penyimpanan

Untuk mengatasi fluktuasi harga musiman, daerah perlu berinvestasi pada pembangunan cold storage, gudang penyimpanan, serta fasilitas rantai dingin di sentra produksi dan pasar. Infrastruktur ini penting agar komoditas pangan dapat disimpan lebih lama tanpa penurunan kualitas, sehingga pasokan tetap stabil pada masa paceklik. Selain itu, dukungan logistik seperti perbaikan jalan produksi, transportasi antarwilayah, dan sistem distribusi berbasis digital akan memperlancar arus barang serta mengurangi biaya transportasi.

Digitalisasi dan integrasi data harga serta stok pangan

Daerah perlu mengembangkan sistem informasi harga dan pasokan terintegrasi antarinstansi untuk mempercepat dan mengefektifkan pengambilan kebijakan. Melalui digitalisasi data, pemerintah dapat memantau fluktuasi harga, mendeteksi gejolak pasokan, dan melakukan intervensi pasar tepat waktu. Kolaborasi dengan BPS, Bulog, dan Bank Indonesia diperlukan untuk memastikan keakuratan data makro dan mikro.